

Interpretasi Multikulturalisme Agama Dan Pendidikan

Ni Nyoman Lisna Handayani¹, Ni Ketut Erna Muliastri²

¹STAHN Mpu Kuturan Singaraja, ²Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: ¹lisnahandayani201@gmail.com, ²erna.muliastri@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Makna multikultural dapat dipahami dari berbagai aspek kehidupan, tetapi lebih sering muncul ke permukaan ketika disentuh oleh pendidikan agama dan multikultural. Kaum pluralis dalam beragama selalu disebut-sebut meski masih banyak konflik yang dilakukan atas nama agama. Dalam dunia pendidikan, seperti halnya wacana pendidikan multikultural, teori, konsep, atau sejenisnya tidak sampai pada taraf siswa belum merealisasikan tindakannya dalam kehidupan yang seharusnya. Secara konseptual, hendaknya mungkin harus menggali makna kearifan lokal multikultural dalam ranah budaya, guna melestarikan budaya dan warisan lokal hingga tidak ditinggalkan begitu saja. Dalam tulisan ini menyoroti bagaimana multikultural tentang beragama dapat dipahami dalam ranah dan dalam ranah pendidikan bukan hanya sekedar wacana tetapi bisa diaplikasikan dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Interpretasi, Multikulturalisme, Agama, Pendidikan

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang multikultur. Kemultikulturan tersebut terdeskripsikan pada beragamnya suku, ras, budaya, agama, etnis dan aspek lainnya. Kemultikulturan tersebut merupakan sebuah kekuatan tersembunyi dan dapat dijadikan sebagai the strong point manakala dikelola dengan baik dalam menghantarkan bangsa ini bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia, namun bila power multikultural tersebut tidak terkelola dengan baik maka hal tersebut dapat mempercepat terpuruknya Indonesia sebagai sebuah negara.

Agama menjadi salah satu kebutuhan manusia. Namun sebaliknya, agama juga seringkali tidak dapat menjawab kebutuhan manusia. Terlebih kebutuhan manusia di zaman post-modern. Akibatnya, banyak orang yang berpaling dari agama atau hanya sekedar menjadikan agama sebagai pemuas kehausan spiritual belaka. Di dalam sebuah masyarakat, agama menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan terutama dalam kehidupan spiritual. Walaupun tidak menutup

kemungkinan di kemudian hari agama menjadi tradisi yang bercampur dengan kebiasaan lama yang telah hidup dalam suatu masyarakat. Kebiasaan tersebut diwarisi secara turun-temurun sehingga tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja. Di sisi lain, agama datang belakangan dengan membawa nilai-nilai baru yang menuntut penganutnya menaati sebuah perintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya kebiasaan yang sudah mentradisi tersebut bertemu dengan agama. Keduanya memiliki kekuatan untuk berdiri.

Tradisi menjadi kuat karena diwarisi secara turun-temurun. Agama datang membawa kebenaran yang didasari oleh kitab suci. Ketika “dikawinkan”, keduanya bisa jadi simbiosis mutualisme atau sebaliknya bertolak belakang sama sekali. Di dalam masyarakat Indonesia yang memiliki banyak tradisi di setiap daerahnya, banyak ajaran agama yang sudah mengalami proses akulturasi dengan budaya setempat. Bagi masyarakat yang bisa memahami keberadaan agama dari segi sosio-historis, ajaran agama yang telah melahirkan tradisi baru dalam masyarakat tersebut merupakan bukti bahwa agama tidak menolak tradisi secara keseluruhan. Sebaliknya agama bisa memberikan ruang kepada nilai-nilai lokal yang dianggap baik.

Bertalian dengan preposisi di atas praktek pendidikan khususnya jenjang pendidikan formal semestinya mampu menjadikan potensi multikultur ini sebagai sebuah acuan, isi dan tujuan yang mesti diterjadikan pada setiap dimensinya, terlebih kalau kita melihat pendidikan sebagai mata pelajaran wajib pada jenjang pendas maka elaborasi nilai- nilai kemultikulturan merupakan sesuatu yang wajib ada disetiap kegiatannya. Upaya meneguhkan kembali paradigma multikultural harus lebih ditekankan kepada persoalan kompetensi kebudayaan, sehingga tidak hanya berkutat pada aspek kognitif melainkan beranjak kepada aspek psikomotorik.

Peneguhan ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran bahwa multikulturalis merupakan pengalaman normal manusia. Untuk itu, pengelolaan masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dilakukan secara *taken for granted* atau *trial and error*, tetapi harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated, dan berkesinambungan. Disinilah fungsi strategis pendidikan multikultural sebagai sebuah proses di mana seseorang mengembangkan

kompetensi dalam beberapa sistem standar untuk mempersepsi, mengevaluasi, meyakini, dan melakukan tindakan. Berdasarkan kajian konseptual dan empiris di atas, dapat disimpulkan betapa pentingnya pendidikan multikultur dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah keberagaman yang telah kita warisi sebagai negara.

Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat majemuk, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal berbagai kelompok masyarakat yang kini dikategorikan sebagai "Bangsa Indonesia" dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai suku bangsa, kelompok penutur bahasa tertentu, maupun ke dalam golongan penganut ajaran agama yang berbeda satu dengan lainnya. Sementara secara vertikal berbagai kelompok masyarakat itu dapat dibeda-bedakan atas dasar *mode of production* yang bermuara pada perbedaan daya adaptasinya. Pada konteks realitas-empirik, kenyataan ini justru kerap terabaikan, bahkan sengaja dilanggar untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Fakta riil di lapangan, seringkali bukannya penghargaan dan pengakuan atas kehadiran yang lain akan tetapi upaya untuk "mempersamakan" (*conformity*) atas nama persatuan dan kesatuan.

Keberagaman budaya, agama, etnis, suku bangsa, dan bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menjadi dasar dalam membangun jiwa nasionalisme dan patriotisme sebagai bangsa yang besar dan kokoh. Namun pada sisi lain, kondisi keberagaman tersebut mampu memicu timbulnya konflik, yang akhirnya memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Upaya internalisasi paham dan perilaku multikultur merupakan kewajiban setiap insan Indonesia agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap bisa dipertahankan.

Motto Bhineka Tunggal Ika sebenarnya mengakomodasi atas keragaman dalam masyarakat bangsa Indonesia dalam suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Ironisnya keragaman dalam kesatuan budaya bangsa dalam perjalanan kemerdekaan negara/bangsa lebih ditekankan pada aspek kesamaan untuk membentuk solidaritas bangsa. Implikasinya, budaya lokal yang kaya dengan perbedaan banyak mengalami erosi atau pengikisan baik secara kuantitas maupun kualitas terutama penggunaan bahasa daerah mengalami kemunduran maupun kehilangan daya gunanya secara pragmatik. Pengembangan nilai-nilai budaya lokal

dan primordial, diantaranya seperti stereotipe, dan etnosentrisme memang dapat menimbulkan perpecahan yang berbahaya. Tetapi konsep primordialisme tersebut memerlukan kajian yang lebih proporsional. Apalagi akibat proses globalisasi, kita sering terasa “sepi” dan memerlukan ikatan komunitas lama yang akrab. Itulah sebabnya pada batas tertentu yang relevan, bisa dipahami kemunculan gerakan-gerakan indigenous people yang telah marak terjadi di banyak negara.

II. Pembahasan

2.1 Pemaknaan Multikultural Dalam Agama dan Pendidikan

Lawrence A Blum, seorang profesor filsafat di University of Massachusetts di Amherst mendefinisikan multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Pemaknaan multikulturalisme ini juga dipaparkan oleh Bikhu Parekh sebagaimana dikemukakan oleh Saifuddin; Multikulturalisme adalah cara pandang kebudayaan yang diwujudkan secara konkret dalam kehidupan yang nyata.

Terminologi multikulturalisme menurut Stavenhagen mengandung dua pengertian. Pertama, ia merupakan realitas sosial dalam masyarakat yang majemuk dan kedua; multikulturalisme berarti keyakinan atau kebijakan yang menghargai pluralisme budaya sebagai khasanah kebudayaan yang diakui dan dihormati keberadaannya. Sejalan dengan terminologi di atas, Supardan mengemukakan bahwa kata kunci dalam multikulturalisme ini adalah “perbedaan” dan “penghargaan”, dua kata yang selama ini sering dikonfrontasikan. Multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian *civility* (keadaban), yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban, dan keadaban yang demokratis. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi, pada umumnya mempunyai kesadaran yang tinggi perihal pentingnya multikulturalisme untuk membangun torelansi, asimilasi, dan persamaan hak di antara warganegara. Semua ini merupakan faktor-faktor kunci dalam konsolidasi

dan pendalaman demokrasi sehingga negara-bangsa mampu bertahan dan berkelanjutan. Yang tidak kurang pentingnya dalam membangun demokrasi multikultural adalah pengakuan atas kekurangan dan kelemahan yang pernah terjadi dalam upaya-upaya penguatan nation-building.

Terkait dengan pengembangan masyarakat dan demokrasi multikultural di atas, peran penting pendidikan menjadi tak terelakan. Dalam pandangan Azra pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara taken for granted atau trial and error. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan. Salah satu strategi penting itu adalah pendidikan multikultural yang dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal dan informal, langsung atau tidak langsung. Pendidikan multikultural menurut Banks adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.⁴ Terkait dengan paradigma pendidikan yang terkandung dalam pasal 1 (1) yang disebutkan, dalam Pasal 1 (2) UU NO. 20/2003 ditegaskan bahwa:

“Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman.” Ada empat kaidah mendasar yang dapat diidentifikasi dalam kandungan ayat ini, yaitu pendidikan nasional dalam rangka mendukung pembangunan manusia Indonesia yang bermartabat, yaitu bahwa:

1. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila dengan bertolak dari keyakinan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara, Falsafah Negara, dan *Way of life* bangsa Indonesia tetap mengandung nilai-nilai dasar yang relevan dengan proses kehidupan dan perkembangan berbangsa dan bernegara, dan memiliki landasan eksistensial yang kokoh baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
2. UUD 1945 sebagai dasar pendidikan nasional mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus bermuara untuk pembangunan bangsa dan negara. Apabila kita berbicara tentang pendidikan dalam konteks

- UUD 1945 yang paling diingat dan sering diperbincangkan, walaupun belum diikuti dengan pemaknaan utuh, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Nilai agama dan budaya menjadi nilai-nilai dasar pendidikan tetapi sekaligus sebagai nilai-nilai yang harus dikembangkan melalui pendidikan dalam konteks pencapaian tujuan utuh pendidikan. Secara historis bangsa Indonesia memang berangkat dari keragaman, dan itulah bangsa yang asli. Oleh karena karakteristik keragaman bangsa Indonesia berbeda dari keragaman bangsa lain, yang dibentuk oleh misalnya kaum imigran seperti Amerika Serikat, maka pendekatan pendidikan yang berasaskan multikultur dari Barat akan sejalan dengan esensi “multikultur” di Indonesia.
 4. Pendidikan harus tanggap pada perubahan zaman, menegaskan bahwa pendidikan harus berorientasi masa depan dan membangun masyarakat Indonesia masa depan yang memiliki daya saing (*competitiveness*) dan daya keberlanjutan (*sustainability*) yang kokoh.

II.2. Multikulturalisme dalam Masyarakat Modern di Indonesia

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam.

Berkaitan dengan multikultural, Soekarno juga pernah menegaskannya, saat ditanya mengenai siapa bangsa Indonesia. “Bangsa Indonesia adalah semua suku yang mendiami wilayah bekas jajahan hinda belanda, baik keturunan maupun siapa pun yang memiliki kesamaan watak, hasrat kuat bersatu padu dan rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan,” tegas Soekarno yang gemar mengadopsi perkataan Ernest Renan dan Otto Bauer. Sehingga jika bertumpu pada perkataan Soekarno tersebut maka jelas bahwa bangsa Indonesia terbentuk bukan karena kesamaan warna kulit, golongan, ras, ataupun agama melainkan karena rasa kesatuan yang kuat atas dasar kedamaian dan kemerdekaan sejati.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, agama dan komunal, pemahaman akan multikultural menjadi sebuah permasalahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terutama dalam pengakomodasian kepentingan dan suara politik kaum minoritas dalam ruang publik. Yang mencolok dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam bentuk komuniti-komuniti suku bangsa dan digunakannya. Kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri.

Berdasarkan ciri-ciri fisik atau tubuh yang dipunyai oleh seseorang, gerakan-gerakan tubuh yang dibarengi dengan bahasa yang digunakan dan logat yang diucapkan dan berbagai simbol-simbol yang digunakan, ia akan diidentifikasi dalam suku bangsa dari sesuatu daerah tertentu oleh orang lain. Bila ciri-ciri tersebut tidak dapat dipergunakan maka seseorang tersebut akan menanyakan dari mana asalnya. Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas.

Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Padahal model masyarakat multikultural ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi "Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah". Oleh karena itu, secara hakiki multikulturalisme seharusnya adalah konsep mutlak.

II.3. Peran Agama dalam Masyarakat Multikultural

Agama yang sudah masuk dalam masyarakat multikultural akan mengalami proses akulturasi sehingga agama bisa memiliki banyak versi khususnya dalam aspek implementasi. Mulai dari segi pemahaman sampai pada arti penting agama sesuai dengan kultur masing-masing daerah atau tempat. Dari masyarakat multikultural inilah lahir perbedaan ekspresi dalam melaksanakan perintah agama. Peranan menjadi sangat penting ketika agama telah dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia, yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat. Pada perkembangan yang demikian itulah agama menjadi berkaitan langsung dengan kebudayaan dalam masyarakat sehingga agama dan masyarakat serta kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik yang saling berpengaruh.

Dalam perspektif sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu perilaku yang diperankan oleh individu ataupun kelompok itu akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam, yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang telah menginternalisasi.

Peter L. Berger melukiskan agama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia karena agama merupakan sarana untuk membela diri terhadap kekacauan yang mengancam manusia. Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi dan teknik organisasi yang tidak diketahuinya. Kondisi masyarakat yang multikultural juga pernah terjadi dalam sejarah Islam. Pada masa kejayaan Islam seperti di Baghdad dan Kordoba, masyarakat di kota-kota tersebut adalah sangat plural. Dengan segala kemampuannya untuk mengakomodir kondisi sosial yang multikultural ini.

Peran agama dalam keadaan masyarakat yang majemuk adalah salah satunya sebagai perekat sosial. Sebuah teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dalam bukunya *The Elementary Forms of Religious Life*. Dengan unsur solidaritas agama memiliki fungsi sosial. Agama bukan ilusi, melainkan merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasi dan mempunyai kepentingan sosial. Karena itu agama sebenarnya tidak berisi kepercayaan terhadap roh-roh atau dewa, akan tetapi lebih pada pemisahan antara yang sakral dan yang profan. Dalam perspektif solidaritas sosial, agama berperan menjembatani ketegangan, menjaga kelangsungan masyarakat ketika dihadapkan pada tantangan kehidupan.

Dalam hal ini, agama berperan penting menyatukan anggota masyarakat melalui deskripsi simbolik suci mengenai kedudukan mereka dalam sejarah, kosmos dan tujuan mereka dalam keteraturan segala sesuatu. Agama sangat baik sekali dalam hal pembinaan masyarakat untuk menuju pada kesejahteraan dan sekaligus nurani masyarakat itu sendiri. Salah satu alasan mengapa demikian adalah *pertama*, agama mengajarkan nilai-nilai yang benar dan baik bagi umatnya. Agama memoles umatnya untuk menjadi individu-individu yang baik dan menjauhkannya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agamanya. *Kedua*, agama mengajarkan cara-cara untuk memperoleh tempat yang indah di akhirat nanti sebagai tujuan akhir kehidupan. Cara-cara ini berintikan pada pelaksanaan ajaran agama masing-masing dengan sungguh-sungguh. Orang yang melaksanakan dengan baik akan memperoleh tempat yang bernama surga, sedangkan orang yang tidak melaksanakannya akan memperoleh tempat yang berkebalikan dengan surga, yaitu neraka. *Ketiga*, agama yang berfokus pada ajaran cinta kasih mengajak umatnya untuk mengasihi sesamanya sehingga antarsesama dapat saling menghargai dan saling tolong-menolong melalui institusi masing-masing yang biasanya diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan. *Keempat*, secara tidak langsung agama mendorong terciptanya perdamaian di muka bumi yang terdiri atas masyarakat yang majemuk melalui ajaran-ajaran tersebut.

Namun demikian agama juga dapat menimbulkan efek yang negatif dalam hal bermasyarakat, terutama pada masyarakat yang majemuk. *Pertama*, agama memiliki dan mengajarkan hal-hal yang bersifat eksklusif dan berbeda untuk

agama yang berbeda pula. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan terhadap masalah-masalah tertentu yang dapat bergesekan. *Kedua*, agama memiliki ambisi berupa misi untuk menyebarkan ajarannya seluas-luasnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri, namun demikian pada masyarakat yang telah beragama seolah-olah timbul pandangan yang menyatakan terjadinya perebutan umat atas agama tertentu. *Ketiga*, dalam internal agama itu sendiri terkadang terjadi suatu perbedaan pandangan ataupun tafsir terhadap ajarannya sehingga muncul aliran-aliran baru dalam agama tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang haus akan berita kebenaran. Perbedaan cara pandang juga dapat menimbulkan kaum ekstremis pada agama tersebut yang mengakibatkan fanatisme sempit dan penguncian diri terhadap pandangan lain. *Keempat*, agama memiliki potensi untuk menimbulkan suatu konflik. Ketiga hal yang telah disebutkan sebelumnya dapat menimbulkan konflik internal maupun eksternal yang akhirnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

III. Penutup

Multikulturalisme adalah suatu keniscayaan, apalagi dalam konteks Indonesia. Keragaman ras, suku, bahasa dan agama merupakan ciri khas serta kelebihan dari bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Namun demikian, perbedaan yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik dan perselisihan. Oleh karena itu, harus ada formula untuk mendamaikan dan menyatukannya. Dalam masyarakat modern, multikulturalisme lebih kompleks lagi. Sebab budaya baru terus bermunculan akibat akses komunikasi dan informasi yang tak terbendung. Saat terjadi pertemuan antara globalisasi negara-bangsa (*nation-state*) dan kelompok identitas maka kemunculan dari kelompok-kelompok identitas ini semakin menguat.

Globalisasi akan mendorong penguatan kesadaran politik dalam kelompok-kelompok ini dan membuka kesadaran yang mendorong pentingnya identitas. Globalisasi memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok identitas untuk menemukan akar identitasnya. Pemahaman agama, sebagai salah satu pilar penting dalam membentuk masyarakat adil dan sejahtera menjadi penting untuk diperhatikan. Artinya, kerigidan, penuhanan atas pemahaman

sendiri dan menganggap yang lain sebagai golongan sesat harus diberantas. Sebab pada hakikatnya tidak ada kebenaran apa pun yang menginjak dan meniadakan kebenaran lain.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, Dasim. (2008). Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Masyarakat Multikultural. Bandung: PT Genesindo.
- Effendy, Bahtiar. (2001). *Masyarakat Agama Dan Pluralisme Keagamaan: Masyarakat Madani, Dan Etos Kewirausahaan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Kartadinata, Sunaryo. *Isu-isu pendidikan: antara harapan dan kenyataan*. Bandung: UPI Press, 2010.
- Liliweri, Alo. (2005). Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara,
- Ma'arif, Syamsul. (2005). *Pendidikan Pluralisme Di Indonesia*. Jogjakarta: Logung Pustaka.
- Muhammad Ali. (2003). *Teologi Pluralis-Multikultural*. Jakarta : Buku Kompas.
- Naim, Ngainun, and Achmad Sauqi. (2008). *Pendidikan Multikultural: Konsep Dan Aplikasi*. Ar-Ruzz Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.